

## **BAB II**

### **DESKRIPSI WILAYAH PENELITIAN**

#### **A. Deskripsi Kabupaten Wakatobi**

##### **1. Gambaran Umum**

Kabupaten Wakatobi merupakan hasil pemekaran Kabupaten Buton yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi, dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara. Nama Wakatobi merupakan akronim dari nama empat pulau terbesar di daerah ini, yakni Wangi-Wangi, Kaledupa, Tomia, dan Binongko.

Latar belakang lahirnya pembentukan suatu daerah pemekaran (lahirnya Kabupaten Wakatobi) adalah karena perkembangan dan kemajuan daerah serta tuntutan masyarakat untuk memperoleh pelayanan yang baik, cepat dan mudah diakses dan juga merupakan hasil dari aspirasi masyarakat dan tokoh-tokoh dari wakatobi. Sehingga dasar-dasar tersebut diakomodir oleh pihak pemerintah pusat dan disahkan melalui Undang-Undang Nomor 29 tahun 2003 tentang

Pelaksanaan pemerintahan di Kabupaten Wakatobi sesuai dengan prinsip otonomi daerah yang dimana memberikan kesempatan kepada daerah otonom untuk meningkatkan demokrasi dan kinerja daerah, dan memberikan keleluasaan kepada daerah otonom untuk mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakatnya sehingga kepentingan masyarakat dan kepentingan daerah dapat terakomodir yang berlandaskan peraturan perundang-undangan. Penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Wakatobi sebagai perwujudan dari agenda reformasi untuk melahirkan pemerintahan yang efektif dan efisien dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat daerah dengan sebaik-baiknya.

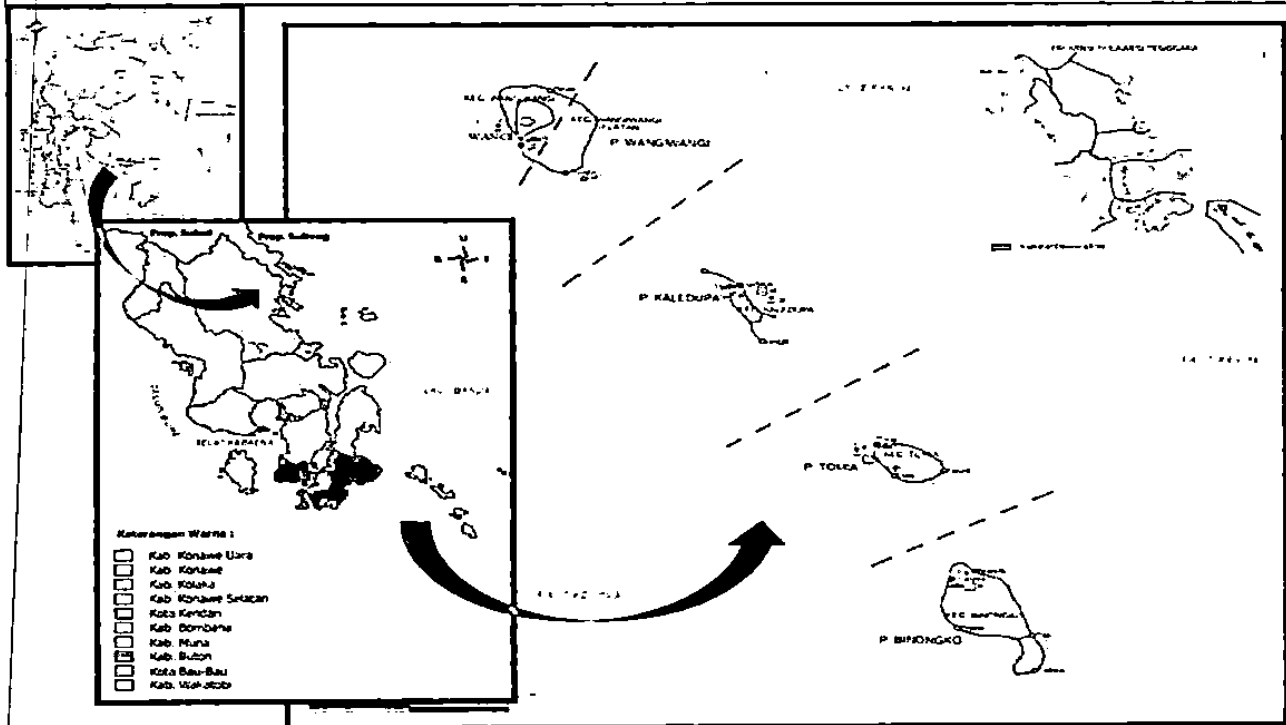
## **1.1. Kondisi Geografis**

### **1.1.1. Letak Geografis dan Posisi Geogstrategis**

Letak geografis, Kabupaten Wakatobi berada dalam gugusan pulau-pulau di jazirah Tenggara Kepulauan Sulawesi Tenggara, tepatnya di sebelah Tenggara Pulau Buton. Secara astronomis terletak pada bagian selatan garis khatulistiwa, membentang dari Utara ke Selatan pada posisi garis lintang  $5^{\circ}12'$  –  $6^{\circ}25'$  Lintang Selatan (sepanjang kurang lebih 160 km) dan garis bujur  $123^{\circ}20'$  –  $124^{\circ}39'$  Bujur

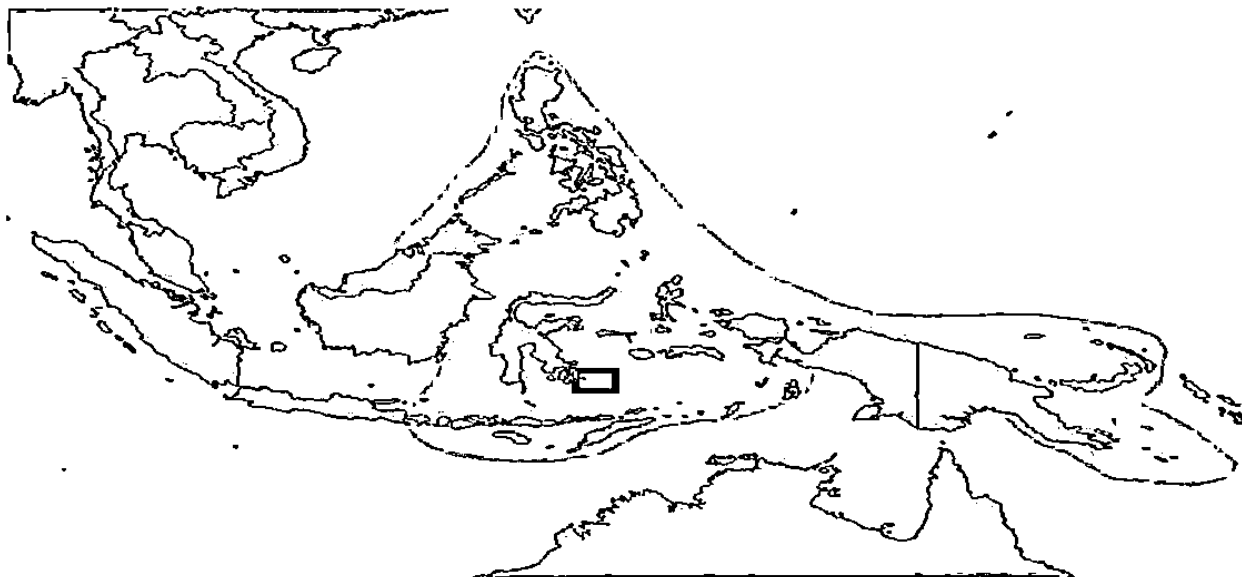
m (sepanjang kurang lebih 100 km) sebagaimana disajikan pada Gambar 2.1

Gambar 2.1. Letak Geografis Kabupaten Wakatobi



Posisi Geostrategis, Kabupaten Wakatobi terletak pada posisi sangat strategis karena: (1) Perairan laut Kabupaten Wakatobi dilalui oleh jalur pelayaran kawasan Timur dan Barat Indonesia; (2) Ditinjau dari sisi *bioregion*, letak geografis Kabupaten Wakatobi sangat penting karena berada pada kawasan yang sangat potensial yakni diapit oleh Laut Banda dan Laut Flores yang memiliki potensi sumberdaya keragaman hayati kelautan dan perikanan yang cukup besar; dan (3) Kabupaten Wakatobi berada pada Pusat Kawasan Segi Tiga Karang Dunia (*Coral Tri-angle Center*) yang meliputi 6 (enam) negara, yakni Indonesia, Malaysia, Philipines, Papua New Guine, Solomon Island, dan Timor Leste. Posisi

Gambar 2.2.  Posisi Wakatobi Dalam Pusat Segi Tiga Karang Dunia



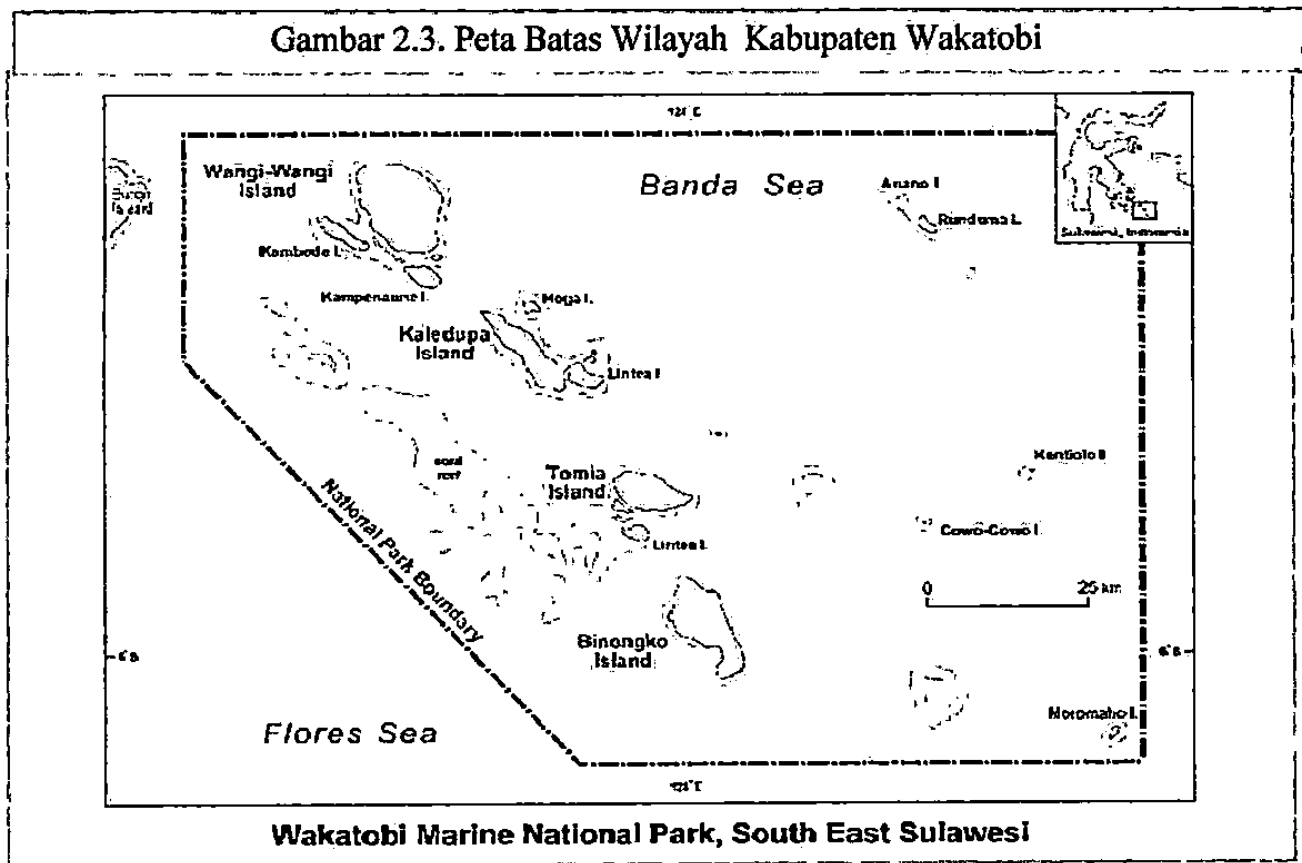
### 1.1.2. Batas Administrasi

Wilayah Kabupaten Wakatobi diapit oleh perairan laut Buton, laut Banda dan laut Flores. Dengan demikian, maka batas-batas administratif daerah Kabupaten Wakatobi berada pada wilayah perairan laut, sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan wilayah perairan laut Kabupaten Buton dan Buton Utara
- Sebelah Timur berbatasan dengan Laut Banda
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Laut Flores

Sebelah Barat berbatasan dengan wilayah perairan laut Kabupaten Buton

Gambar 2.3. Peta Batas Wilayah Kabupaten Wakatobi



### 1.1.3. Luas Wilayah

Luas wilayah Kabupaten Wakatobi adalah sekitar 19.200 km<sup>2</sup>, terdiri dari daratan seluas ± 823 km<sup>2</sup> atau hanya sebesar 3%, dan luas perairan ± 18.377 km<sup>2</sup> atau sebesar 97 % dari luas Kabupaten Wakatobi adalah perairan laut. Secara administratif Kabupaten Wakatobi terdiri dari 8 wilayah kecamatan, 75 desa dan 25 kelurahan. Wilayah kecamatan terluas adalah kecamatan Wangi-Wangi dengan luas 241 km<sup>2</sup> (29,40%) yang sekaligus merupakan wilayah ibu kota Kabupaten, sedangkan kecamatan yang wilayahnya paling kecil adalah kecamatan Kaledupa,

luas 15,50 km<sup>2</sup> (0,08%). Luas wilayah terdapat pada Tabel 2.1 sebagai

Tabel 2.1. Luas Wilayah Daratan Kabupaten Wakatobi Menurut Wilayah Administrasi Kecamatan, Tahun 2011.

No.	Kecamatan	Jumlah Desa	Jumah Keurahan	Luas Daratan (km <sup>2</sup> )	Prosentase (%)
1.	Wangi-Wangi	14	6	241,98	29,40
2.	Wangi-Wangi Selatan	18	3	206,02	25,03
3.	Kaledupa	12	4	45,50	5,53
4.	Kaledupa Selatan	10	-	58,50	7,11
5.	Tomia	8	2	47,10	5,72
6.	Tomia Timur	5	4	67,90	8,25
7.	Binongko	5	4	93,10	11,31
8.	Togo Binongko	3	2	62,90	7,64
<b>Total</b>		<b>75</b>	<b>25</b>	<b>823,00</b>	<b>100,00</b>

Sumber : Kabupaten Wakatobi Dalam Angka, 2011

## 1.2. Kondisi Demografi

### 1.2.1. Jumlah dan Komposisi Penduduk Menurut Jenis Kelamin

Penduduk Kabupaten Wakatobi menurut hasil sensus penduduk tahun 2010 adalah berjumlah 92,995 jiwa, terdiri dari laki-laki 44.640 jiwa dan perempuan 48.355 jiwa. Pada tahun 2011, jumlah penduduk Kabupaten Wakatobi menjadi 95.712 Jiwa. Komposisi dan penyebaran penduduk Kabupaten Wakatobi

... .. Kecamatan pada tahun 2011 selengkapnya disajikan

Tabel 2.2. Komposisi Penduduk Kabupaten Wakatobi Menurut Jenis Kelamin Tahun 2011.

No	Kecamatan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1.	Wang-Wangi	11.753	12.334	24.087
2.	Wangi-Wangi Selatan	12.117	13.143	25.260
3.	Kaledupa	4.928	5.344	10.272
4.	Kaledupa Selatan	3.064	3.777	6.841
5.	Tomia	3.420	3.681	7.101
6.	Tomia Timur	4.176	4.512	8.688
7.	Binongko	4.152	4.469	8.621
8.	Togo Binongko	2.334	2.508	4.842
	Jumlah	45.944	49.768	95.712

Sumber : BPS Kabupaten Wakatobi, kondisi Desember 2011.

Kepadatan penduduk Kabupaten Wakatobi pada tahun 2011 rata-rata 116,30 jiwa/km<sup>2</sup>. dengan pertumbuhan selama 10 tahun terakhir rata-rata 0,33% per tahun. Wilayah yang tertinggi tingkat kepadatan penduduknya adalah Kecamatan Kaledupa yaitu rata-rata 225,76 jiwa/km<sup>2</sup>, dan terendah di kecamatan Togo Binongko, yaitu rata-rata 76,98 jiwa/km<sup>2</sup>, selengkapnya disajikan pada Tabel 2.3, sebagai berikut :

Tabel 2.3. Kepadatan Penduduk Kabupaten Wakatobi Menurut Kecamatan Tahun 2011.

No.	Kecamatan	Luas (km <sup>2</sup> )	Penduduk (jiwa)	Kepadatan (jiwa/km <sup>2</sup> )
1	Wang-Wangi	241,98	24.087	99,54
2	Wangi-Wangi Selatan	206,02	25.260	122,61
3	Kaledupa	45,50	10.272	225,76
4	Kaledupa Selatan	58,50	6.841	116,94
5	Tomia	47,10	7.101	150,76
6	Tomia Timur	67,90	8.688	127,95
7	Binongko	93,10	8.621	92,60
8	Togo Binongko	62,90	4.842	76,98
<b>Jumlah</b>		<b>823,00</b>	<b>95.712</b>	<b>116,30</b>

Sumber : BPS Kabupaten Wakatobi, Kondisi Desember 2011

### 1.2.2. Komposisi Penduduk Menurut Jenis Pekerjaan

Komposisi penduduk Kabupaten Wakatobi menurut jenis pekerjaan utama sampai dengan tahun 2011 masih dominan (51,28%) yaitu sebesar 22.547 jiwa

Data selengkapnya disajikan pada Tabel 2.4



Tabel 2.4. Komposisi Penduduk Kabupaten Wakatobi Menurut Jenis Pekerjaan Utama Tahun 2011

No.	Lapangan Usaha Utama	Laki-Laki (Jiwa)	Perempuan (Jiwa)	Jumlah (Jiwa)	Persen (%)
1	Pertanian	23.495	22.110	22.547	51,28
2	Pertambangan, Penggalian	911	399	220	0,50
3	Industri	1.730	1.479	1.692	3,85
4	Listrik, Air	53	52	71	0,16
5	Konstruksi	1.122	1.427	1.660	3,78
6	Perdagangan, Akomodasi	4.556	5.191	7.526	17,12
7	Transportasi, Komunikasi	3.403	2.29	3.815	8,68
8	Keuangan, Persewaan	51	170	198	0,45
9	Jasa Kemasyarakatan, Sosial	5.486	6.081	6.240	14,19
<b>Jumlah</b>		<b>40 807</b>	<b>39 538</b>	<b>43 969</b>	<b>100,00</b>

Sumber : BPS Kabupaten Wakatobi, Olahan Sakernas Agustus 2011

### 1.3. Kondisi Sosial

Kebijakan pokok dalam pembangunan di bidang kesejahteraan sosial ditujukan untuk peningkatan kesadaran rasa tanggung jawab sosial, dan kemampuan serta ketahanan sosial masyarakat untuk mengatasi masalah-masalah yang dihadapi dalam kehidupan bermasyarakat serta mendorong terwujudnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan kesejahteraan sosial.

#### 1.3.1. Indeks Pembangunan Manusia

Secara makro kondisi sosial masyarakat Wakatobi dapat dijabarkan pada kinerja pemerintah kabupaten Wakatobi didalam membangun kualitas masyarakat Wakatobi. Kinerja tersebut dapat diukur salah satunya melalui tingkat pencapaian Indeks Pembangunan Manusia, yang didalamnya mencakup pada tiga aspek yakni

indikator pendidikan, kesehatan, dan pendapatan. Dalam kurun waktu 5 tahun terakhir

tingkat capaian IPM Kabupaten Wakatobi dari tahun ke tahun terus meningkat.

Hal tersebut dapat tergambarkan dalam Tabel 2.5 sebagai berikut:

Tabel 2.5. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Wakatobi Tahun 2006 - 2010.

No.	Uraian	Tahun				
		2006	2007	2008	2009	2010
1.	<b>Pendidikan</b>					
	- Angka Melek Huruf (%)	85,45	88,78	88,80	89,13	89,86
	- Rata-Rata Lama Sekolah (Tahun)	6,25	6,50	6,52	6,85	6,89
2.	<b>Kesehatan</b>					
	- Angka Harapan Hidup (Tahun)	67,60	67,69	67,83	67,95	68,07
3.	<b>Pendapatan</b>					
	- Daya Beli (Ribuan Rupiah)	579,03	584,38	589,39	593,12	-
<b>IPM</b>		<b>64,16</b>	<b>65,54</b>	<b>66,03</b>	<b>66,70</b>	<b>67,20</b>

Sumber : BPS Kabupaten Wakatobi, Tahun 2006-2010

Meningkatnya capaian nilai IPM memperlihatkan terjadinya perbaikan kualitas sumber daya manusia di Wakatobi dari tahun ke tahun dari kategori menengah kebawah pada tahun 2006 eningkat pada status menengah keatas sejak tahun 2008. Secara lebih rinci, kondisi masing-masing aspek agregat tersebut dapat digambarkan sebagai berikut :

### 1.3.2. Pendidikan

Peningkatan capaian kinerja pendidikan memberikan kontribusi yang sangat penting didalam peningkatan sumberdaya manusia. Pembangunan pendidikan merupakan investasi jangka panjang. Upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Wakatobi di bidang pendidikan telah menunjukkan hasil yang bermakna, meskipun belum dapat menuntaskan seluruh permasalahan

Agregat IPM Kabupaten Wakatobi Tahun 2006-2010, adalah sebagaimana disajikan pada Tabel 2.6 dibawah ini :

Tabel 2.6. Indikator Kinerja Pendidikan Yang Menjadi Agregat IPM Kabupaten Wakatobi Tahun 2006-2010.

No.	Uraian	Tahun				
		2006	2007	2008	2009	2010
1.	Angka melek huruf (%)	85,45	88,78	88,80	89,13	89,86
2.	Angka Partisipasi kasar					
	- SD/MI (%)	107.11	108.94	112.08	117.41	110.65
	- SMP/MTs (%)	91.64	94.52	99.24	99.53	104.67
	- SMA/SMK/MA (%)	49.43	69.68	74.37	80.14	96.13
3.	Angka Patisipasi Murni					
	- SD/MI (%)	89.28	90.49	92,46	91,19	94,70
	- SMP/MTs (%)	55.49	71.79	68,17	70,86	79,31
	- SMA/SMK/MA (%)	23.16	53.21	52,59	58,39	67,70
4.	Rata-rata lama sekolah	6,25	6,50	6,52	6,85	6,89

Sumber: Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Wakatobi, 2010

Peningkatan partisipasi masyarakat di dalam pendidikan tersebut, juga diimbangi dengan peningkatan kualitas pendidikan yang dilihat dari capaian rata-rata hasil ujian Nasional dan angka Kelulusan. Pada tahun 2010, angka rata-rata nilai ujian Nasional untuk jenjang SD/MI sebesar 6,77 dengan angka kelulusan sebesar 98,15%, nilai ujian Nasional untuk jenjang SMP/MTs rata-rata 6,90 dengan angka kelulusan sebesar 98,15%, dan nilai ujian nasional untuk jenjang SMA/SMK/MA rata-rata 6,00 dengan angka kelulusan sebesar 98,15%

### 1.3.3. Pengangguran

Kondisi ketenagakerjaan di Kabupaten Wakatobi memperlihatkan bahwa jumlah penduduk usia kerja dan angkatan kerja dari tahun ke tahun cenderung menurun. Penduduk usia kerja pada tahun 2006 sebanyak 62.123 orang dan pada tahun 2010 menjadi 61.102 orang atau menurun sebesar 1,67%, sedangkan angkatan kerja menurun dari 44.435 orang pada tahun 2006 menjadi 41.779 orang pada tahun 2010 atau terjadi penurunan sebesar 5,98%.

Keberhasilan Pemerintah kabupaten Wakatobi dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat Wakatobi juga ditandai dengan menurunnya angka pengangguran terbuka, yakni dari 8,80% pada tahun 2006 dan pada tahun 2010 turun menjadi 5,17%. Secara makro kondisi ketenagakerjaan di kabupaten Wakatobi selengkapnya disajikan pada Tabel 2.7 sebagai berikut :

Tabel 2.7. Indikator Ketenagakerjaan Kabupaten Wakatobi tahun 2006-2010

No.	Uraian	Tahun				
		2006	2007	2008	2009	2010
1.	Penduduk Usia kerja (Orang)	62.123	61.009	60.194	61.602	61.102
2.	Angkatan kerja (Orang)	44.435	42.963	42.384	43.619	41.779
	- Bekerja (Orang)	40.525	38.284	40.117	40.668	39.617
	- Mencari Pekerjaan/ menganggur (Orang)	3.910	4.679	2.267	2.951	2.162
3.	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)	71,53	70,42	70,41	70,81	68,38
4.	Tingkat Pengangguran terbuka (%)	8,80	10,89	5,35	6,77	5,17

## **2. Gambaran Pemerintahan**

Penyelenggaraan pemerintahan sesuai misi Kabupaten Wakatobi tahun 2006-2011 ditujukan untuk menjaga terselenggaranya tata pemerintahan yang baik. Dalam pelaksanaannya sesuai kewenangan dan fungsi pemerintah daerah, Pemerintah Kabupaten Wakatobi berupaya untuk mengembangkan dan menyempurnakan kebijakan, regulasi, pelayanan, kelembagaan dan manajerial pemerintahan. Secara makro kondisi pemerintahan tergambar sebagai berikut:

### **2.1. Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Daerah**

Peningkatan kapasitas pemerintah daerah tidak dapat terlepas dari kondisi kualitas SDM aparatnya sendiri. Berkenaan dengan hal tersebut kebijakan pengelolaan SDM diarahkan untuk meningkatkan kepatuhan, kualitas, kesejahteraan dan profesionalisme aparatur pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang didukung sarana dan prasarana yang memadai. Kondisi SDM Aparatur Kabupaten Wakatobi 5 (lima) tahun terakhir disajikan pada Table 2.8 sebagai berikut :

Tabel 2.8. Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kabupaten Wakatobi Menurut Pendidikan Tahun 2007-2011.

No	Pendidikan	Jumlah dan Proporsi									
		2007		2008		2009		2010		2011	
		(Org)	(%)	(Org)	(%)	(Org)	(%)	(Org)	(%)	(Org)	(%)
1.	SD Sederajat	15	0,70	13	0,56	10	0,37	12	0,38	10	0,30
2.	SMP Sederajat	14	0,65	19	0,82	29	1,07	9	0,29	12	0,36
3.	SMA Sederajat	672	31,40	661	28,37	647	23,95	612	19,54	579	17,24
4.	D-I	37	1,73	77	3,30	72	2,67	55	1,76	67	2,00
5.	D-II	535	25,00	531	22,79	664	24,58	793	25,32	748	22,28
6.	D-III	145	6,78	191	8,20	249	9,22	404	12,90	470	14,00
7.	S1	711	33,22	813	34,89	997	36,91	1205	38,47	1406	41,87
8.	S2	15	0,70	25	1,07	33	1,22	42	1,34	65	1,94
9.	S3	-		-		-		-		1	0,03
<b>Jumlah</b>		<b>2.140</b>	<b>100,00</b>	<b>2.330</b>	<b>100,00</b>	<b>2.701</b>	<b>100,00</b>	<b>3.132</b>	<b>100,00</b>	<b>3.358</b>	<b>100,00</b>

Sumber: Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat Kabupaten Wakatobi, 2011

Peningkatan kapasitas pemerintah juga dilakukan dengan penyempurnaan organisasi perangkat daerah. Pada tahun 2009, Pemerintah Kabupaten Wakatobi telah menyempurnakan Struktur Organisasi Perangkat Daerah sesuai dengan PP 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah yang ditetapkan melalui Perda : (1). Perda Nomor : 5 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Wakatobi sebagaimana telah dirubah melalui Perda Nomor : 19 Tahun 2010 tentang Perubahan tentang Susunan Organisasi dan

Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Wakatobi (2). Perda Nomor : 6 Tahun 2008

tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Wakatobi sebagaimana telah dirubah melalui Perda Nomor : 21 Tahun 2010 tentang tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Wakatobi, dan (3). Perda Nomor : 4 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Dan Sekretariat DPRD Kabupaten Wakatobi sebagaimana telah dirubah melalui Perda Nomor : 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Dan Sekretariat DPRD Kabupaten Wakatobi. Perda tersebut juga merupakan implementasi komitmen Pemerintah Kabupaten Wakatobi untuk meningkatkan pelayanan masyarakat dengan prinsip hemat struktur kaya fungsi. Adapun struktur organisasi perangkat daerah Kabupaten Wakatobi yaitu:

a. Sekretariat, terdiri dari 3 SKPD, yaitu :

1). Sekretariat Daerah

Sekretaris Daerah Kabupaten Wakatobi dibantu oleh 3 (tiga) orang Asisten yaitu :

(a). Asisten Bidang Pemerintahan (Asisten I) membawahi :

- ⊙ Bagian Pemerintahan Umum;
- ⊙ Bagian Hukum dan Perundang-Undangan;
- ⊙ Bagian Organisasi dan Kepegawaian

(b). Asisten Bidang Administrasi Perekonomian, Pembangunan dan Administrasi Sumber Daya Alam (Asisten II) membawahi :

⊙ Bagian Administrasi Perekonomian

⊙ Bagian Administrasi Pembangunan

⊙ Bagian Administrasi Sumber Daya Alam

(c). Asisten Bidang Administrasi Umum (Asisten III) membawahi :

⊙ Bagian Umum dan Rumah Tangga

⊙ Bagian Kesra

⊙ Bagian Kemasyarakatan

2). Sekretariat DPRD

3). Sekretariat Dewan Pengurus Korpri

b. Dinas Kabupaten, terdiri dari 12 SKPD, yaitu :

1). Dinas Pendidikan Nasional, Pemuda dan Olah Raga;

2). Dinas Kesehatan;

3). Dinas Pekerjaan Umum, Pertambangan dan Energi;

4). Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;

5). Dinas Tata Ruang, Kebersihan, Pertamanan, Pemakaman dan Pemadam  
Kebakaran;

6). Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan  
Menengah;

7). Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;

8). Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;

9). Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi;

10). Dinas Pertanian, Kehutanan, Perkebunan dan Peternakan;

11). Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;

12). Dinas Kelautan dan Perikanan



c. Lembaga Teknis Daerah, terdiri dari :

1. Inspektorat 1 SKPD
2. Rumah Sakit Umum Daerah 1 SKPD
3. Badan, terdiri dari 7 (tujuh) SKPD, yaitu :
  - 1). Badan Perencanaan Pembangunan, Penanaman Modal, Penelitian dan Pengembangan Daerah,
  - 2). Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan
  - 3). Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Linmas
  - 4). Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
  - 5). Badan Lingkungan Hidup
  - 6). Badan Ketahanan Pangan
  - 7). Badan Penanggulangan Bencana
4. Kantor, terdiri dari 4 (empat) SKPD, yaitu :
  - 1). Kantor Perpustakaan Daerah, Pengelolaan Data Elektronik Dan Arsip
  - 2). Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu
  - 3). Kantor Satuan Polisi Pamong Praja
  - 4). Kantor Penghubung (Kendari)

d. Kecamatan, terdiri dari 8 kecamatan, yaitu :

- 1). Kecamatan Wangi-Wangi
- 2). Kecamatan Wangi-Wangi Selatan
- 3). Kecamatan Kaledupa

- 5). Kecamatan Tomia
- 6). Kecamatan Tomia Timur
- 7). Kecamatan Binongko
- 8). Kecamatan Togo Binongko

### 3. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

Dalam rangka mewujudkan program pembangunan Kabupaten Wakatobi dalam upaya melahirkan pembangunan yang lebih baik di masa depan, maka berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Wakatobi Tahun 2012-2016 ditetapkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang di jabarkan sebagai berikut

#### 3.1. Visi

Wakatobi merupakan salah satu daerah yang ada di Indonesia yang memiliki biota bawah laut terkaya dan terindah di dunia. Hasil penelitian *Operation Wallacea* yang bermarkas di London, menunjukkan bahwa dari 850 spesies terumbu karang teridentifikasi di dunia, sekitar 90 persen atau sebanyak 750 spesies ditemukan di perairan Wakatobi sementara di Laut Merah Mesir sebanyak 300 jenis dan Caribia hanya 50 spesies. Selain memiliki biota laut terindah di dunia, di perairan Wakatobi juga terdapat atol tunggal terpanjang di dunia, yakni "*Atol Kaledupa*". Posisi Wakatobi sangat strategis karena terletak di Laut Banda yang masuk dalam kawasan segi tiga karang dunia yang meliputi 6 (enam) negara, yakni Indonesia, Malaysia, Philipines, Papua New Guiner,

satu daerah kunjungan wisata. Berbeda halnya dengan wisatawan mancanegara yang datang ke Bali, wisatawan mancanegara yang datang ke Wakatobi, selain berwisata menikmati keindahan bawah laut Wakatobi, mereka juga melakukan penelitian (*wisatawan science*). Fakta-fakta inilah yang kemudian mengilhami lahirnya visi Kabupaten Wakatobi, yakni: **“Terwujudnya Surga Nyata Bawah Laut di Pusat Segi Tiga Karang Dunia”**

Pada visi Kabupaten Wakatobi terdapat tiga kata kunci atau pokok visi, yaitu **Surga nyata, Bawah laut, dan Pusat segi tiga karang dunia**. Penjelasan dari ketiga pokok visi tersebut adalah sebagai berikut:

***Surga nyata*** adalah perwujudan kesejahteraan dan kemakmuran baik secara ekonomi, sosial dan lingkungan hidup serta daya saing daerah yang didukung oleh situasi ketertiban dan ketentraman umum yang kondusif.

***Bawah laut*** adalah perwujudan kemanfaatan dan kelestarian atas potensi sumberdaya bawah laut dan perairannya khususnya dalam hal kelautan, perikanan, pariwisata, dan lingkungan/kawasannya.

***Pusat segi tiga karang dunia*** adalah aktualisasi posisi geostrategis Wakatobi, yakni pada pusat segitiga karang dunia yang mempunyai keanekaragaman hayati tertinggi di dunia.

Secara umum, Visi ***Surga Nyata Bawah Laut di Pusat Segi Tiga Karang Dunia*** dapat dimaknai sebagai sebuah **“niati”** (kearifan lokal/bahasa daerah) atau **“nawaitu”** (bagi kaum muslimin) yang berarti sebuah keinginan yang kuat atau sebuah cita-cita/mimpi besar. Visi ini juga merupakan bagian integral dalam

upaya mewujudkan “visi nasional” maupun “visi Sulawesi Tenggara”. Dengan demikian, makna yang lebih jauh dari visi ini merupakan *way of life*. Surga itu sendiri merupakan simbol yang indah-indah, simbol kesejahteraan dan kebahagiaan. Inilah makna simbolik yang diinginkan oleh pemerintah daerah dan masyarakat Wakatobi untuk memberikan pelayanan sebagai surga. Agar *surga nyata bawah laut* dapat menciptakan *surga nyata di darat*, maka selama kurun waktu lima tahun kedepan akan dilakukan berbagai terobosan strategis, antara lain dengan melanjutkan pembangunan Bandara Matahora, sarana dan prasarana jalan, pengembangan pelabuhan dan dermaga sebagai pintu-pintu ekonomi dan laboratorium kelautan sebagai pusat penelitian kelautan dan perikanan bertaraf internasional serta pengembangan sarana dan prasarana pendidikan, kesehatan dan agama.

Dengan demikian, pembangunan daerah yang ingin dicapai dalam berbagai bidang diarahkan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah ini. Peningkatan kesejahteraan merupakan ujung tombak upaya pemerataan pembangunan karena manusia dan sumberdaya manusia itulah tujuan segala upaya pembangunan daerah.

### 3.2. Misi

Dalam upaya mewujudkan “*Surga Nyata Bawah Laut di Pusat Segi Tiga Karang Dunia*”, dan memperhatikan perubahan paradigma dan isu-isu strategis serta kondisi yang akan dihadapi pada masa yang akan datang, maka dijabarkan

1. Mendorong peningkatan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat.

Dimana Misi pertama ini adalah mencakup upaya-upaya yang terkait dengan *sustainable livelihood, sustainable finance management*, pendidikan dan kesehatan.

2. Meningkatkan pengelolaan dan pelestarian sumberdaya alam.

Pada Misi yang kedua ini adalah sebagai upaya-upaya yang terkait dengan pelestarian dan pemanfaatan potensi kelautan, perikanan dan ekowisata dalam prinsip pengelolaan sumberdaya pesisir secara terpadu, pengelolaan sumberdaya air secara terpadu dan konservasi biodiversitas secara terpadu.

3. Meningkatkan kualitas dan daya dukung infrastruktur wilayah.

Misi ketiga yaitu terkait dengan upaya-upaya penyediaan, pemeliharaan dan peningkatan fungsi infrastruktur perhubungan, komunikasi, informatika, air bersih, energi listrik, pemukiman dan pengaman pantai.

4. Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan.

Misi keempat ini mencakup upaya-upaya yang terkait dengan peningkatan kualitas SDM aparatur dan sistem pelayanan publik serta perwujudan tata pemerintahan yang baik.

5. Mengembangkan situasi yang kondusif bagi kehidupan masyarakat yang inovatif.

Dan misi yang terakhir yaitu misi kelima adalah sebagai upaya-upaya yang terkait dengan peningkatan dan pematapan ketenteraman, ketertiban,

dan peningkatan kualitas sumber daya manusia dengan penelitian dan pengembangan serta

### **3.3. Tujuan**

Adapun tujuan dari misi pembangunan Kabupaten Wakatobi yaitu:

1. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi.
2. Meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia.
3. Menurunnya angka kemiskinan.
4. Meningkatnya pemanfaatan sumberdaya alam yang ramah lingkungan.
5. Meningkatnya fungsi ekologi sumberdaya alam.
6. Meningkatnya aksesibilitas wilayah.
7. Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam pemanfaatan ruang wilayah.
8. Meningkatnya kinerja Aparatur Pemerintah Daerah.
9. Meningkatnya kondisi sosial budaya yang inovatif serta situasi tenteram dan tertib.

### **3.4. Sasaran**

Adapun sasaran dari tujuan pembangunan Kabupaten Wakatobi yaitu:

1. Angka PDRB per kapita per tahun di atas rata-rata Provinsi Sulawesi Tenggara.
2. Indeks Pembangunan Manusia peringkat 7 besar di Provinsi Sulawesi Tenggara.
3. Angka kemiskinan di bawah rata-rata Provinsi Sulawesi Tenggara.
4. Wakatobi menjadi kiblat dalam pemanfaatan, pelestarian dan pengkajian biodiversitas laut.
5. Jumlah dan Jenis biodiversitas terpelihara serta ketersediaan air bersih

6. Jumlah dan kualitas infrastruktur semakin meningkat.
7. Masyarakat patuh dan taat dalam pemanfaatan ruang wilayah berdasarkan tata ruang daerah.
8. Kualitas pelayanan publik, pengelolaan keuangan daerah, kompetensi dan kinerja pemerintah daerah meningkat.
9. Situasi yang tenteram, tertib dan aman.
10. Kerjasama daerah, penelitian dan pengembangan sosial budaya meningkat.
11. Kuatnya kapasitas, fungsi dan peran kelembagaan lokal.

## **B. Profil Sekretariat DPRD Kabupaten Wakatobi**

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah merupakan unsur staf pemerintah daerah yang dimana secara tugas dan fungsinya adalah menyelenggarakan administrasi kesekretariatan DPRD, menyelenggarakan administrasi keuangan DPRD, menyelenggarakan rapat-rapat DPRD, dan menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang di perlukan oleh DPRD. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sekretariat DPRD dipimpin oleh seorang sekretaris yang dimana secara tehknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada pimpinan DPRD dan secara administrasi bertanggung jawab kepada Bupati melalui sekretaris daerah. Tugas dan fungsi sekretariat DPRD dan juga tugas dari sekretaris DPRD diatur dalam peraturan daerah Kabupaten Wakatobi No. 4 tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan

## 1. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

Sebagai sebuah organisasi sekretariat DPRD tentu memiliki visi, misi, tujuan serta sasaran, adapun visi, misi, tujuan dan sasaran sekretariat DPRD dirumuskan sebagai berikut:

### 1.1. Visi

Mengacu pada tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD kabupaten Wakatobi sesuai ketentuan Peraturan yang berlaku dan berbagai isu strategis yang dihadapi, maka ditetapkan Visi Sekretariat DPRD Kabupaten Wakatobi adalah: *Terwujudnya Tata Kelola Administrasi dan Pelayanan Prima Dalam Mendukung Tri Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wakatobi*. Visi ini diharapkan dapat meningkatkan semangat kerja, mampu menjawab tantangan yang terjadi sehingga dapat meningkatkan produktivitas kinerja aparatur, serta dapat mengintegrasikan pelaksanaan kebijakan. Dengan demikian, Visi yang ditetapkan akan membantu organisasi Sekretariat DPRD untuk mendefinisikan kemana organisasi akan dibawa dan membantu mendefinisikan bagaimana pelayanan harus dilaksanakan, sehingga Sekretariat DPRD Kabupaten Wakatobi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi organisasi akan tetap eksis, antisipatif, inovatif dan produktif



## **1.2. Misi**

Adapun misi dari Sekretariat DPRD Kabupaten Wakatobi yaitu:

- a. Mewujudkan sistem tata kelola administrasi yang handal, efektif, efisien, dan akuntabel.
- b. Mewujudkan pelayanan prima dalam fasilitasi penyelenggaraan fungsi Legislasi DPRD.
- c. Mewujudkan pelayanan prima dalam fasilitasi penyelenggaraan fungsi Anggaran DPRD yang akuntabel dan tepat waktu.
- d. Mewujudkan pelayanan prima dalam fasilitasi penyelenggaraan fungsi Pengawasan DPRD yang transparan dan efektif.
- e. Meningkatkan Pengetahuan, Profesionalisme, dan integritas untuk peningkatan kinerja.

## **1.3. Tujuan**

- a. Terwujudnya sistem administrasi dan manajemen kesekretariatan yang profesional.
- b. Tercapainya tata kelola kesekretariatan dan tata kelola kelembagaan DPRD yang baik.
- c. Tercapainya kinerja Sekretariat DPRD dan Kinerja Kelembagaan DPRD yang optimal dalam pelaksanaan tugas.
- d. Terwujudnya kelancaran fasilitasi Fungsi Legislasi DPRD bersama

- e. Terbangunnya Kapasitas Kelembagaan DPRD Kabupaten Wakatobi melalui fasilitasi Setwan dalam membentuk Perda inisiatif.
- f. Terwujudnya kelancaran pembahasan dan penetapan RAPBD sesuai politik anggaran yang akuntabel.
- g. Terbangunnya kapasitas kelembagaan DPRD Kabupaten Wakatobi melalui fasilitasi Setwan dalam penetapan RAPBD tepat waktu.
- h. Terwujudnya kelancaran fasilitasi Setwan dalam mendukung penyelenggaraan sistem pengawasan DPRD untuk mewujudkan pemerintahan yang baik.
- i. Terwujudnya kelancaran fasilitasi Setwan dalam mendukung kinerja pengawasan DPRD yang efektif dan akuntabel.
- j. Terwujudnya peningkatan pengetahuan, kemampuan profesionalisme DPRD Kabupaten Wakatobi melalui orientasi dan Pendalaman tugas.
- k. Terwujudnya peningkatan pengetahuan, profesionalisme dan integritas staf Sekretariat DPRD Kabupaten Wakatobi untuk peningkatan kinerja.

#### **1.4. Sasaran**

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh lembaga dalam jangka waktu tahunan, semesteran, triwulan atau bulanan. Sasaran menggambarkan hal yang

ini diwujudkan melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk

mencapai tujuan. Adapun sasaran yang ingin dicapai oleh sekretariat DPRD yaitu:

- a. Penguatan kelembagaan Sekretariat DPRD Kabupaten Wakatobi untuk mewujudkan optimalisasi kinerja DPRD Kabupaten Wakatobi.
- b. Dukungan Administrasi/Manajemen dan pelaksanaan tugas teknis pada Sekretariat DPRD Kabupaten Wakatobi
- c. Peningkatan penyediaan prasarana dan sarana pada Sekretariat DPRD Kabupaten Wakatobi
- d. Fasilitasi pelaksanaan fungsi legislasi DPRD dalam pembentukan produk hukum bersama Kepala Daerah, baik pembentukan peraturan daerah inisiatif Kepala Daerah maupun pembentukan peraturan daerah inisiatif DPRD Kabupaten Wakatobi.
- e. Fasilitasi fungsi anggaran DPRD, dalam bentuk rapat-rapat pembahasan dan penetapan KUA-PPAS, RAPBD murni, maupun pembahasan KUA-PPAS RAPBD Perubahan tepat waktu sesuai jadwal yang telah ditentukan.
- f. Fasilitasi fungsi pengawasan DPRD, dalam bentuk pembahasan LKPJ Kepala Daerah akhir tahun anggaran, Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD, dan Laporan Akhir Masa Jabatan Kepala Daerah serta pengawasan terhadap peraturan atas pelaksanaan peraturan perundang-undangan, Peraturan Daerah dan Pengawasan atas pengaduan masyarakat.

## **2. Tugas Pokok dan Fungsi**

Sebagai unsur pelaksana otonomi daerah Sekretariat DPRD Kabupaten Wakatobi memiliki tugas pokok dan fungsi dalam rangka mendukung tugas dan fungsi DPRD, adapun tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Wakatobi yaitu:

### **2.1. Tugas Pokok**

Sekretariat DPRD Kabupaten Wakatobi mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, dan menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang dibutuhkan DPRD. Tugas tersebut dijabarkan dalam uraian tugas yakni :

- a. Menyusun rencana kerja Sekretariat DPRD dan Program Kerja DPRD sebagai pedoman kerja.
- b. Menyusun anggaran, memeriksa, meneliti, dan membukukan keuangan DPRD dan Sekretariat DPRD.
- c. Mengkoordinasikan kegiatan bagian dalam rangka memadukan rencana kegiatan masing-masing bagian agar terjalin kerjasama dan kesatuan tindakan yang harmonis dalam melaksanakan tugas.
- d. Mendistribusikan tugas kepada bagian dengan memberikan disposisi pada naskah dinas sesuai bidang tugas masing-masing agar pekerjaan terbagi habis
- e. Mengoreksi dan penganalisaan serta pamarafan konsep produk

- f. Menunjang penyelenggaraan pelaksanaan program kerja tahunan DPRD.
- g. Merencanakan pelaksanaan peningkatan sumber daya manusia berkaitan dengan tugas, fungsi dan wewenang DPRD.
- h. Merencanakan dan menyelenggarakan/mengelola urusan rumah tangga, perjalanan dinas, kepegawaian dan ketatausahaan DPRD.
- i. Memimpin, mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada para Kepala Bagian, sesuai bidang tugasnya.
- j. Membina dan memotivasi bawahan/pegawai serta memelihara kemampuan berprestasi pegawai disetiap bagian dalam rangka peningkatan produktivitas kerja dan pengembangan karier pegawai.
- k. Memantau, mengendalikan, mengevaluasi dan menilai pelaksanaan tugas bagian sesuai data dan informasi yang dihasilkan agar diketahui realisasi program, hambatan dan upaya pemecahan untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
- l. Mengoreksi dan memaraf konsep surat di lingkup Sekretariat DPRD.
- m. Menyelenggarakan koordinasi dengan Instansi pemerintah dan lembaga lain dalam rangka kelancaran kegiatan DPRD.
- n. Melaksanakan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi seluruh penyelenggaraan tugas Sekretariat DPRD.
- o. Memberikan saran dan bahan pertimbangan kepada Pimpinan DPRD, yang berkaitan dengan kegiatan kesekretariatan DPRD, dalam rangka

- p. Menyiapkan bahan penyelenggaraan rapat dan pembuatan risalah rapat-rapat yang diselenggarakan DPRD.
- q. Menyiapkan penyelenggaraan hubungan masyarakat, dokumentasi, publikasi, keprotokolan serta mengelola perpustakaan DPRD.
- r. Memelihara dan membina keamanan serta ketertiban dalam.
- s. Menyediakan tenaga ahli fraksi dan kelompok pakar yang membantu DPRD, sesuai dengan kebutuhan.
- t. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati dan Pimpinan DPRD sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
- u. Penyelenggarakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas/kegiatan Sekretariat DPRD, sesuai ketentuan yang berlaku.
- v. Menyampaikan laporan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, yang berkaitan dengan tugas-tugas administrasi Sekretariat DPRD, sesuai ketentuan yang berlaku.

## **2.2. Fungsi**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas Sekretariat DPRD Kabupaten Wakatobi mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD.
- b. Penyelenggaraan/pengelolaan administrasi keuangan DPRD dan Sekretariat DPRD.
- c. Penyelenggaraan rapat-rapat DPRD penyelenggaraan dan penyiapan

1. Menyiapkan bahan penyelenggaraan rapat dan pembuatan risalah rapat

hukum dan pengelolaan kepustakaan.

- d. Pemeliharaan dan pembinaan keamanan serta ketertiban urusan dalam.
- e. Penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.

### 3. Potensi Sumber Daya Pegawai

Tabel 2.9. Jumlah Pegawai Yang Menduduki Jabatan Pada Sekretariat DPRD

NO	NAMA JABATAN	JUMLAH
1	Sekretaris DPRD	1
2	Kepala Bagian	4
3	Kepala Sub Bagian	7
4	Staf	18

Sumber: Renstra Sekretariat DPRD Kab. Wakatobi 2012-2016

Jumlah personil Sekretariat DPRD Kabupaten Wakatobi sebanyak 30 (*tiga puluh*) orang, termasuk 3 (*tiga*) orang adalah Pegawai Negeri Sipil yang diperbantukan.

Tabel 2.10. Jumlah Pegawai Pada Sekretariat DPRD Berdasarkan Tingkat Pendidikan

NO	JABATAN	JUMLAH					JML.	KETERANGAN
		S2	S1	D3	SLTA	SLTP		
	PNS							
1	Sekretaris DPRD	1					1	
2	Kepala Bagian	1	3				4	
3	Kepala Sub Bagian		4		3		7	
4	Staf	2	8		8		18	Total : 30 Orang
	HONORER							
5	Staf/ Pelaksana		10	4	60		74	

Tabel 2.11. Jumlah Pegawai Pada Sekretariat DPRD Berdasarkan Golongan

NO	JABATAN	GOLONGAN				JML	KETERANGAN
		IV	III	II	I		
	PNS						
1	Sekretaris DPRD	1				1	
2	Kepala Bagian	4				4	
3	Kepala Sub Bagian	1	7			8	
4	Staf		11	10		21	Total : 30 Orang

Sumber: Renstra Sekretariat DPRD Kab. Wakatobi 2012-2016

Tabel 2.12. Jumlah Pegawai pada Sekretariat DPRD berdasarkan pendidikan jabatan

NO	JABATAN	DIKLAT JABATAN			JML	KETERANGAN
		DIKLAT PMI II	DIKLAT PMI III	ADUM/ DIKLAT PIM IV		
	PNS					
1	Sekretaris DPRD		1		1	
2	Kepala Bagian		1		1	
3	Kepala Sub Bagian			2	2	
4	Staf				0	Total : 4 Orang

Sumber: Renstra Sekretariat DPRD Kab. Wakatobi 2012-2016

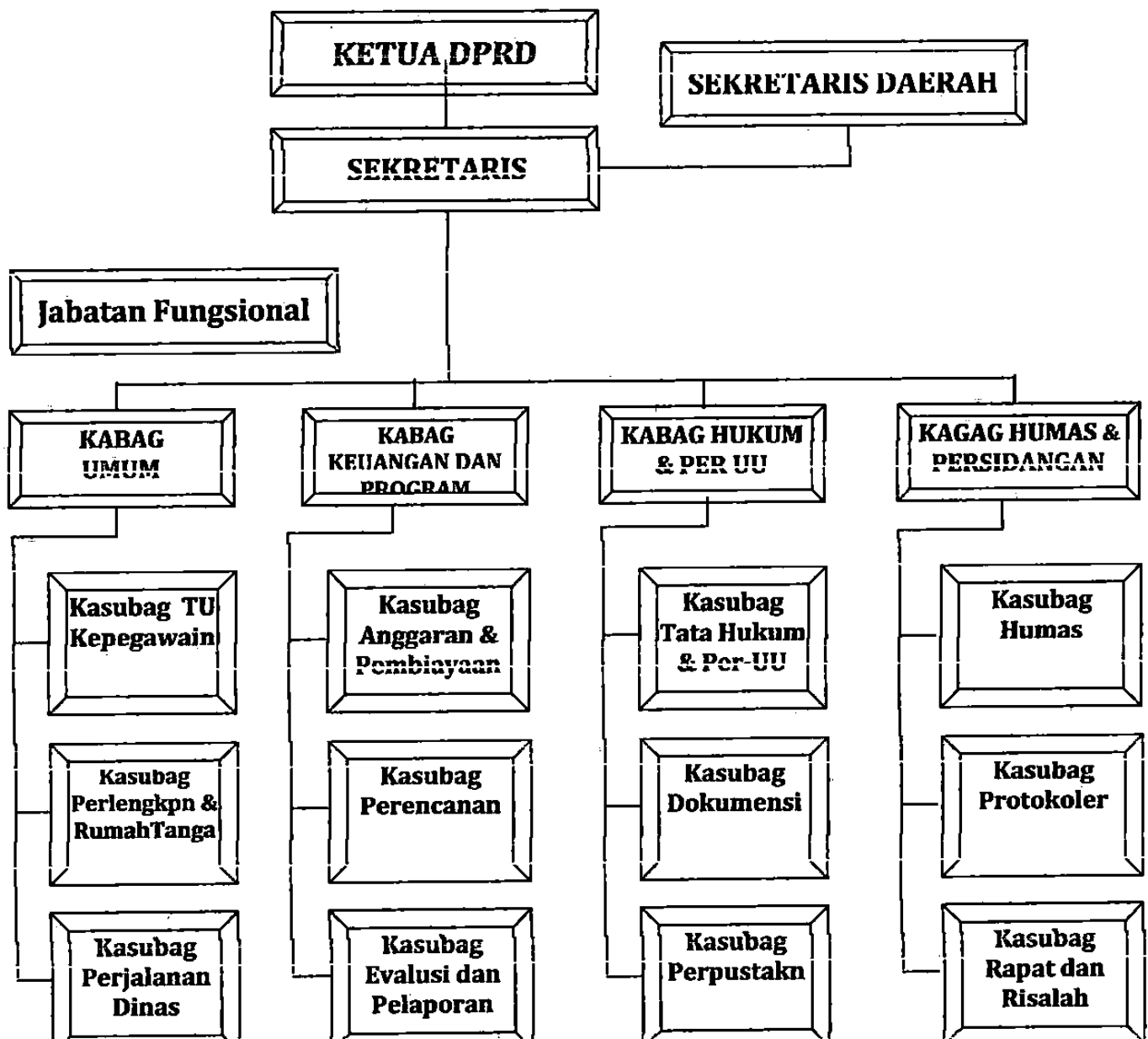
#### 4. Struktur Organisasi

Struktur organisasi merupakan bagian yang menggambarkan unit-unit kerja dalam sebuah organisasi yang secara hirarkis tersusun sebagai upaya untuk mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran. Adapun struktur organisasi Sekretariat DPRD Kabupaten Wakatobi terdiri dari, sekretaris DPRD, kelompok jabatan fungsional, bagian dan sub bagian yang



Struktur organisasi Sekretariat DPRD Kabupaten Wakatobi didasarkan pada Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Untuk lebih jelasnya secara lengka struktur organisasi sekretariat DPRD disajikan pada gambar 2.4.

**Gambar 2.4. Struktur Organisasi Sekretariat DPRD Kabupaten Wakatobi**



Berdasarkan bagan struktur organisasi Sekretariat DPRD Kabupaten Wakatobi diatas, maka Sekretaris DPRD dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh empat orang kabag yaitu kabag umum, kabag keuangan dan program, kabag hukum dan per uu, dan yang terakhir adalah kabag humas dan persidangan. Masing-masing kabag dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh kasubang. Sebagaimana dijelaskan diatas masing-masing bagian dipimpin oleh seorang kepala bagian (kabag) yang dimana dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris DPRD. Adapun tugas dari masing-masing kabag yaitu sebagai berikut:

#### 1. Kabag Umum

Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan sebagian Tugas Sekretariat DPRD dalam menyelenggarakan urusan tata usaha dan kepegawaian, perjalanan dinas, perlengkapan dan rumah tangga DPRD.

Adapun dalam melaksanakan tugasnya, seorang kabag umum mempunyai fungsi:

- a. Pelaksanaan pengelolaan urusan surat menyurat, arsip, kepegawaian, ketatalaksanaan, pendidikan dan pelatihan.
- b. Pelaksanaan pengelolaan rumah tangga dan rumah jabatan Pimpinan DPRD.
- c. Pelaksanaan urusan pengelolaan barang dan aset Sekretariat DPRD.
- d. Pelaksanaan urusan administrasi perjalanan dinas DPRD.

... dan koordinasi dan pengkoordinasian tenaga ahli

- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris DPRD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

## 2. Kabag Keuangan dan Program

Bagian Keuangan dan Program mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretariat DPRD meliputi urusan penatausahaan keuangan, pengkoordinasian penyusunan rencana program/kegiatan dan anggaran DPRD dan Sekeretariat DPRD serta evaluasi dan pelaporan. Dalam menyelenggarakan tugasnya kabag keuangan dan program mempunyai fungsi yaitu:

- a. Penyusunan rencana program dan kegiatan.
- b. Penyusunan rencana anggaran.
- c. Pengelolaan dan penatausahaan keuangan pada Sekretariat DPRD.
- d. Penyusunan dan penyampaian evaluasi dan pelaporan.
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris DPRD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

## 3. Kabag Hukum dan Perundang-undangan

Bagian Hukum dan Perundang-undangan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretariat DPRD dalam menghimpun dan menyiapkan referensi Peraturan Perundang-undangan, fasilitasi penyusunan rancangan Peraturan Daerah, mengadministrasikan Peraturan dan Keputusan DPRD, mengelola dan mengembangkan perpustakaan serta mendokumentasikan kegiatan DPRD. Kabag hukum dan perundang-

1. Kabag hukum dan perundang-undangan mempunyai fungsi yaitu:

- a. Pelaksanaan fasilitasi penyusunan rancangan peraturan Daerah.
- b. Pelaksanaan urusan administrasi Keputusan DPRD.
- c. Pelaksanaan dokumentasi kegiatan-kegiatan DPRD.
- d. Pengelolaan dan pelayanan perpustakaan DPRD.
- e. Penyusunan dan penyampaian evaluasi dan pelaporan.
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris DPRD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

#### 4. Kabag Humas dan Persidangan

Bagian Humas dan Persidangan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretariat DPRD dalam pembuatan risalah rapat-rapat DPRD, mengatur dan mengkoordinasikan penyelenggaraan rapat dan mempublikasikan kegiatan DPRD serta melaksanakan fasilitasi hubungan masyarakat dengan DPRD.

Adapun fungsi dari kabag humas dan persidangan adalah:

- a. Penyelenggaraan pembuatan risalah rapat-rapat DPRD.
- b. Penyiapan, pengaturan, pengkoordinasian pelaksanaan rapat-rapat DPRD.
- c. Penyiapan kelengkapan rapat-rapat yang diselenggarakan oleh DPRD.
- d. Menyenggarakan keprotokoleran DPRD.
- e. Pelaksanaan publikasi kegiatan DPRD.
- f. Pelaksanaan fasilitasi hubungan masyarakat dengan DPRD.

- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris DPRD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Sementara dalam menjalankan tugasnya masing-masing bagian dibantu oleh sub bagian yang dimana sub bagian ini dipimpin oleh seorang kepala subbagian (kasubag) yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala bagian masing-masing. Adapun sub bagian tersebut adalah:

1. Bagian Umum terdiri dari :

- a. Subbagian Tata Usaha dan Kepegawaian.

Subbagian Tata Usaha dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan ketatausahaan yang meliputi pengelolaan surat menyurat dan arsip, kepegawaian, ketatalaksanaan, pendidikan dan pelatihan.

- b. Subbagian Perlengkapan dan Rumah Tangga.

Subbagian Perlengkapan dan rumah tangga mempunyai tugas menyiapkan kebutuhan rumah tangga Pimpinan DPRD dan Sekretariat DPRD, mengelola barang dan aset Sekretariat DPRD.

- c. Subbagian Perjalanan Dinas.

Subbagian Perjalanan Dinas mempunyai tugas melaksanakan urusan administratif perjalanan Pimpinan dan Anggota DPRD serta pegawai Sekretariat DPRD.

2. Bagian keuangan terdiri dari :

a. Subbagian Anggaran dan Pembiayaan.

Subbagian Anggaran dan Pembiayaan mempunyai tugas menyusun rencana anggaran, mengelola dan menatausahakan keuangan pada Sekretariat DPRD.

b. Subbagian Perencanaan.

Subbagian Perencanaan mempunyai tugas menyusun rencana program kegiatan pimpinan dan anggota DPRD serta sekretariat DPRD.

c. Subbagian Evaluasi dan Pelaporan.

Subbagian Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan evaluasi dan pelaporan pada Sekretariat DPRD.

3. Bagian Tata Hukum dan Perundang-undangan terdiri dari :

a. Subbagian Tata Hukum dan Perundang-undangan.

Subbagian Tata Hukum dan Perundang-undangan mempunyai tugas menghimpun pedoman dan petunjuk teknis, menyiapkan referensi Peraturan Perundang-undangan, memfasilitasi penyusunan rancangan Peraturan Daerah dan menyelenggarakan urusan administrasi Keputusan DPRD.

b. Subbagian Dokumentasi.

Subbagian Dokumentasi mempunyai tugas menghimpun,

c. **Subbagian Perpustakaan.**

Subbagian Perpustakaan mempunyai tugas mengelola administrasi dan memberikan pelayanan perpustakaan.

4. **Bagian Humas dan persidangan terdiri dari:**

a. **Subbagian Humas.**

Subbagian Humas mempunyai tugas melaksanakan publikasi kegiatan DPRD dan fasilitasi hubungan masyarakat dengan DPRD serta melakukan koordinasi kehumasan di dalam dan di luar Sekretariat DPRD.

b. **Subbagian Protokoler.**

Subbagian Protokoler mempunyai tugas melaksanakan keprotokoleran DPRD, pengaturan dan koordinasi penyelenggaraan rapat dan penerimaan tamu pimpinan DPRD.

c. **Subbagian Rapat dan Risalah.**

Subbagian Rapat dan Risalah mempunyai tugas menyiapkan perlengkapan kegiatan rapat, mengumpulkan bahan pembuatan risalah serta menyiapkan risalah rapat